

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Dikatakan bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pendapatan domestik brutonya saja, tetapi juga oleh tingkat pendidikan penduduknya, keadaan kesehatannya dan rata-rata angka harapan hidup. Secara konsep, pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas kesempatan yang ada untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan hal ini umumnya dicapai dengan meningkatkan kemampuan dasar dan daya beli. Ketika masyarakat kompeten, produktivitas mereka akan semakin meningkat dan menjadi sarana yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi efektif (Laisina, 2015).

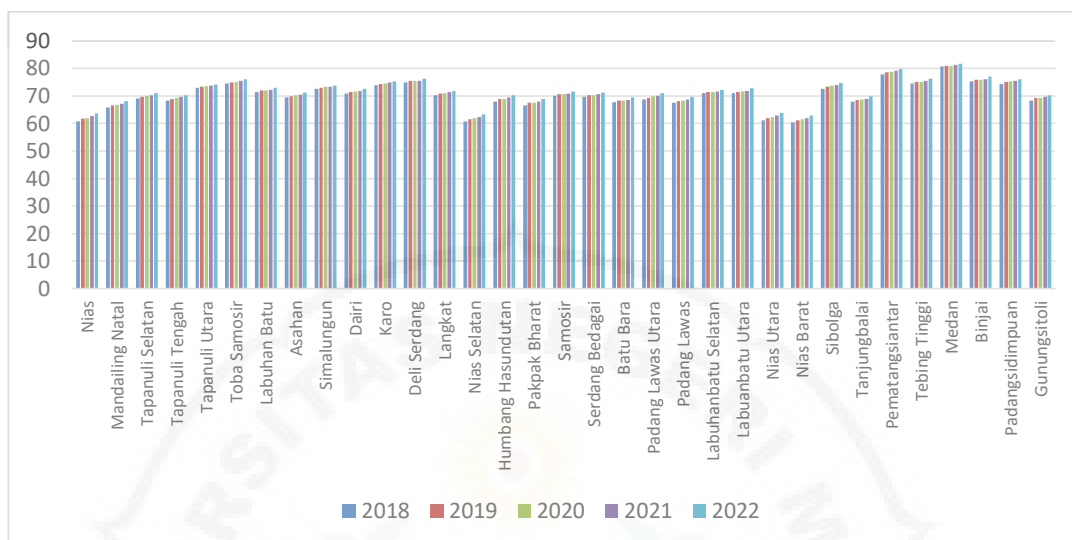
Menurut *United Nation Development Programme* (1995), pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memberikan masyarakat lebih banyak pilihan yang tersedia di berbagai bidang seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan fisik. Terdapat empat hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan manusia : produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia perlu mengkaji permasalahan pembangunan manusianya. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan indikator sosial dan ekonomi suatu masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Indonesia mengalami masalah ketidakmerataan dalam pembangunan manusia yang diukur oleh indeks pembangunan manusia (IPM). Kesenjangan nilai indeks pembangunan manusia antar wilayah akan memengaruhi capaian IPM secara keseluruhan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, selisih antara IPM tertinggi dan terendah sebesar 20,33 ini mengindikasikan terdapat kesenjangan pembangunan yang tinggi di Indonesia.

Salah satu provinsi yang masih mengalami kesenjangan pembangunan manusia adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia dengan 33 Kabupaten/Kota namun rata-rata skor IPM-nya lebih rendah dibandingkan skor IPM nasional (Arifin, dkk 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor IPM Sumatera Utara mencapai 72 poin pada 2021. Angka itu meningkat 0,32% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 71,77 poin. Namun demikian, skor IPM Sumatera Utara masih di bawah rata-rata IPM nasional yang sebesar 72,29 poin pada 2021.

Ketidakmerataan pembangunan manusia tidak hanya terjadi antar provinsi tetapi juga antar kabupaten. Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara cukup bervariasi, terdapat 1 (satu) kota yang mencapai kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota dalam kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$) dan 9 (sembilan) kabupaten/kota dalam kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia “rendah” ($IPM < 60$). Berikut data IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 33 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia yang terus meningkat sejak tahun 2018. Selama periode 2018-2022, Kota Medan menempati posisi pertama dalam peringkat IPM. Nilai indeks pembangunan manusia di Kota Medan yaitu sebesar 81,76 pada tahun 2022 yang sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai satu-satunya kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Kota Medan mendapat indeks tertinggi karena dari sisi usia harapan hidup mencapai 72,64 tahun. Kemudian dari sisi harapan lama sekolah melebihi 12 tahun yakni 14,72 tahun dan rata-rata lama sekolah menyentuh 11,37 tahun. Terakhir, dari sisi pengeluaran perkapita pertahun mencapai Rp.14,84 juta. Angka yang cukup timpang bila dibandingkan dengan Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Barat merupakan wilayah dengan angka IPM terendah (62,93)

pada tahun 2022 dibanding peningkatan yang dicapai kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Rendahnya angka indeks ini disebabkan rendahnya angka harapan hidup di kabupaten tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 angka harapan hidup Kabupaten Nias Barat hanya mencapai 68,96 tahun.

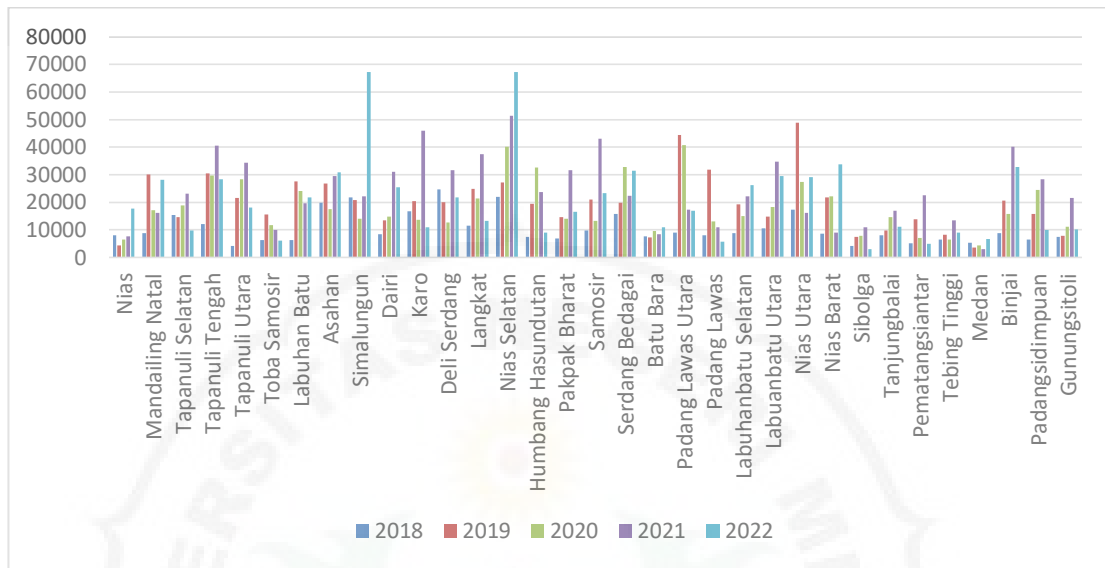
Kesenjangan indeks pembangunan manusia Kota Medan dan Kabupaten Nias Barat juga disebabkan perbedaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kota Medan adalah pusat dari semua kegiatan seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dapat mendukung Kota Medan dalam mencapai pembangunan manusia yang berkualitas. Kota Medan memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Sedangkan Kabupaten Nias Barat menurut BPS tahun 2020 tidak memiliki rumah sakit umum maupun khusus.

Pencapaian pembangunan manusia perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan isu yang strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia yang dimana dalam ketetapan Badan Pusat Statistik (BPS) kualitas hidup manusia di Indonesia dihitung berdasarkan IPM. Indeks pembangunan manusia dipengaruhi atau didukung tiga indikator penyusun utama : indeks kesehatan, indeks pendidikan dan standar hidup layak. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan digunakan oleh BPS untuk menghitung standar hidup layak.

Variabel yang kerap dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia adalah pendidikan. Todaro (2008) menyatakan bahwa pendidikan adalah tujuan pembangunan yang paling mendasar. Nasution (2021) menyebutkan bahwa secara umum pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap dan produktivitas, pendidikan memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Menurut Mankiw (2006), peningkatan kualitas modal manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesempatan hidup layak.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan kesempatan hidup layak, dalam hal ini dapat dicapai melalui pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Menurut Sukirno (2013), kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yang merupakan suatu tindakan pemerintah melalui instrumen anggaran untuk mengatur perekonomian. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan fasilitas layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut grafik data perkembangan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 :



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1. 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Fluktuasi ini disebabkan setiap tahunnya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan pengalokasian, baik cakupan maupun target sasaran sesuai kebutuhan daerah. Selama periode 2018-2022, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada tingkat kabupaten/kota paling besar adalah Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata sebesar 41,6 juta rupiah sedangkan kabupaten dengan pengeluaran pendidikan paling rendah adalah Kota Medan dengan rata-rata sebesar 4,6 juta rupiah. Besaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti rehabilitasi fisik gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah serta fasilitas pendidikan

lainnya di sekolah. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya, oleh karena itu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah.

Berdasarkan data di atas, kabupaten yang memiliki pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbesar adalah Kabupaten Nias Selatan, namun jika dilihat pada gambar 1.1 IPM Kabupaten Nias Selatan masih berada di kisaran 60 poin. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan paling sedikit adalah Kota Medan tetapi Kota Medan menempati posisi pertama dalam peringkat IPM yang mencapai nilai indeks sebesar 81,76 dengan kategori sangat tinggi.

Secara teori, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Terlihat pada gambar 1.2 pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 di tingkat Kabupaten/Kota seperti pada Kabupaten Karo, tahun 2021 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Kabupaten Karo sebesar 45.943 juta rupiah namun pada tahun 2022 turun sebesar 10.887 juta rupiah, diikuti dengan Kabupaten Langkat yang juga mengalami penurunan dari 37.514 juta rupiah menjadi 13.253 juta rupiah pada tahun 2022 dan kabupaten/kota lain juga mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan (gambar 1.1). Seharusnya

pada tahun tersebut kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan yang disebabkan turunnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.

Pembangunan manusia pada sektor pendidikan perlu dipertimbangkan, karena manusia mengalami prosesnya melalui pendidikan. Manusia melalui proses tersebut untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan atau keahlian, serta untuk meningkatkan kreativitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya saat ini untuk keuntungan di masa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia rendah maka tingkat pendidikan dan kesehatan juga akan rendah, hal ini tentunya akan berdampak pada pembangunan manusia.

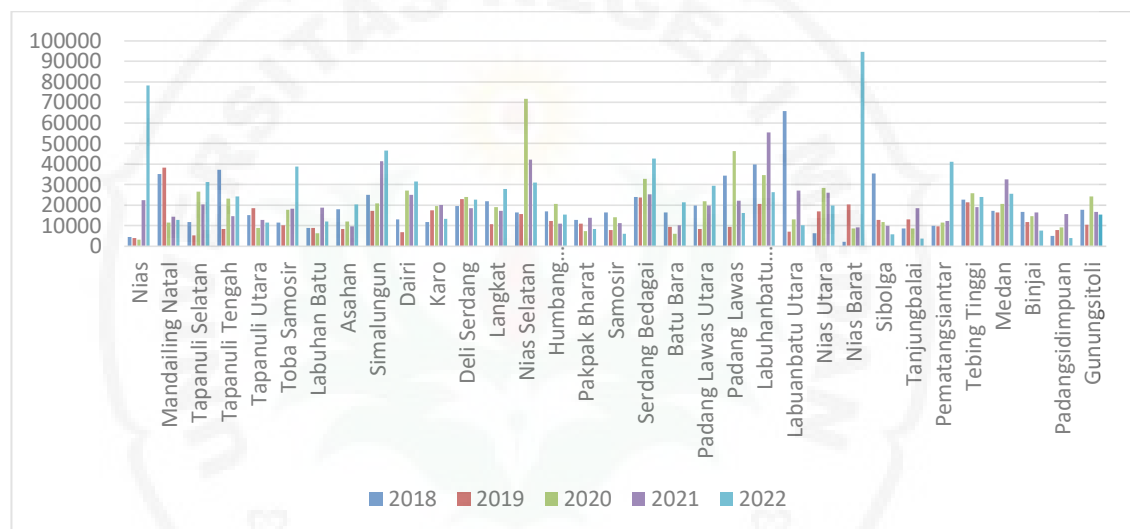
Penelitian yang mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan indeks pembangunan manusia telah banyak diteliti sebelumnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, seperti pada penelitian sebelumnya Andiny dan Sari (2018), Darnawaty dan Purnasari (2019), Listianingsih dkk (2022), Putri dan Kurnia (2022). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Laode dkk (2020), dan Mahuze dkk (2022) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Serta hasil penelitian Agustina dkk (2016) yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Tentunya perbedaan hasil

penelitian menjadi kajian yang menarik untuk lebih memperjelas hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan indeks pembangunan manusia khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan. Menurut Mills & Gilson (1990:35), kesehatan merupakan suatu kebutuhan (*need*) yang diartikan secara umum merupakan perbandingan antara situasi nyata dan standar teknis tertentu yang telah disepakati. Selain itu juga kesehatan merupakan kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) yaitu kebutuhan yang dirasakan sendiri oleh individu. Sehingga keputusan untuk memanfaatkan suatu pelayanan kesehatan merupakan pencerminan kombinasi normatif dan kebutuhan yang dirasakan.

Asri (2013), melihat kualitas manusia dari sudut pandang kesehatan dan menemukan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi sumber daya manusia adalah kesehatan; dengan kata lain faktor kesehatan mempengaruhi kualitas manusia. Penurunan kualitas manusia disebabkan oleh berkurangnya konsumsi kalori, kekurangan gizi, ataupun masalah kesehatan lainnya yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas manusia disertai dengan keterlambatan perkembangan mental. Menurut Todaro & Smith (2003), hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh suatu negara guna meningkatkan produktivitas penduduknya. Salah satu cara untuk memenuhi hak mendasar tersebut adalah dengan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan.

Berikut grafik data perkembangan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 :



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (data diolah 2023)

Gambar 1. 3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2018-2022. Fluktuasi ini disebabkan setiap tahunnya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan pengalokasian, baik cakupan maupun target sasaran sesuai kebutuhan daerah. Selama periode 2018-2022, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada tingkat kabupaten/kota paling besar adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan rata-rata sebesar 35,4 juta rupiah sedangkan kabupaten dengan pengeluaran kesehatan paling rendah adalah Kota Padang Sidempuan yaitu rata-rata sebesar 8,3 juta rupiah.

Besaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, penyediaan alat kesehatan puskesmas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah.

Secara teori, indeks pembangunan manusia berkorelasi positif dengan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia semakin meningkat akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Terlihat pada gambar 1.3 bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 di tingkat kabupaten/kota seperti pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tahun 2021 pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 55.437 juta rupiah namun pada tahun 2022 turun sebesar 26.213 juta rupiah, diikuti dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang juga mengalami penurunan dari 27.197 juta rupiah menjadi 10.184 juta rupiah pada tahun 2022 dan kabupaten/kota lain juga mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan (gambar 1.1). Seharusnya pada tahun tersebut kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan yang disebabkan turunnya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan.

Kajian yang mengkaitkan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan indeks pembangunan manusia sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori kesehatan memberikan dampak positif pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya, Mahulauw dkk (2016), Andiny dan Sari (2018), Mahuze dkk (2022), Wahyuni dan Amar (2023). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Kahang dkk (2016), dan Listianingsih dkk (2022) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Serta hasil penelitian Hidayati dan Imaningsih (2022) yang menyatakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Tentunya perbedaan hasil penelitian menjadi kajian yang menarik untuk lebih memperjelas hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan indeks pembangunan manusia khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengkaitkan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Mempertimbangkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta IPM merupakan masalah yang umum terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka masalah indeks pembangunan manusia dengan segala faktor yang mempengaruhinya ini semakin

menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan serangkaian persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Selama periode 2018-2022 indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat. Namun demikian, skor IPM Sumatera Utara masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 72,29 poin pada tahun 2021.
2. Adanya hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan indeks pembangunan manusia. Terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa pengeluaran pada sektor pendidikan berkorelasi negatif dengan indeks pembangunan manusia, namun secara teori terdapat korelasi positif antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan indeks pembangunan manusia.
3. Adanya hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan indeks pembangunan manusia. Terdapat beberapa data yang

menunjukkan bahwa pengeluaran pada sektor kesehatan berkorelasi negatif dengan indeks pembangunan manusia, namun secara teori terdapat korelasi positif antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dengan indeks pembangunan manusia.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian menggunakan variabel indeks pembangunan manusia (IPM), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
2. Data untuk variabel penelitian hanya diperoleh dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Data yang dipakai merupakan data tahunan dalam kurun waktu 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pemaparan yang dilakukan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber pembelajaran yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara serta menjadi referensi bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, memberikan bukti empiris bagaimana indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi mahasiswa, sebagai informasi mengenai indeks pembangunan manusia khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai indeks pembangunan manusia lebih lanjut.
3. Bagi Universitas, untuk menambah referensi ilmu pengetahuan pada perpustakaan Universitas Negeri Medan untuk dijadikan bahan pembelajaran pada masa yang akan datang khususnya mahasiswa/i jurusan ekonomi.
4. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tertentu dalam pengambilan keputusan.